

**DATA PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO	PROGRAM KEGIATAN	EVALUASI
AREA PEMATAAN TATA LAKSANA		
1	Penerapan SOP Administrasi Pemerintahan	Telah diterapkan Standar Operasional Prosedur pada beberapa pelayanan, diantaranya : SOP Pelaksanaan Rapat Internal, SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja, SOP Pelaporan DUK, SOP Penyusunan LRA, Neraca dan CaLK.
2	Penerapan standar pelayanan publik	Pelayanan publik sudah dilakukan dengan mengirim laporan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ke grup whatsapp dinas kearsipan dan perpustakaan untuk di lanjutkan di share di PPD lumajang.proses pengadaan keluhan langsung bisa ke petugas yang menjaga dan melayani.
3	Penyimpanan Asip Elektronik	Asip yang diterima dan dilanjutkan dengan tindakan pengendalian, pencatatan : 1. Buku Agenda, 2. Lembar Disposisi, 3. Agenda Elektronik, untuk kemudian didistribusikan kepada bidang-bidang.
4	Penerapan Tata Naskah Dinas	Telah mengikuti sosialisasi NADINE yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Lumajang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
AREA PEMATAAN SDM APARATUR		
1	Analisis jabatan	Analisis jabatan telah dilakukan. Dengan Analisis jabatan dapat menyempurnakan organisasi agar sesuai dengan Desain Organisasi yang tepat dan baik. Dan untuk mengetahui kebutuhan ideal atas jabatan di sebuah unit kerja atau OPD. Salah satu hasil analisis adalah Peta Jabatan. Sehingga hal ini dapat mengetahui lebih kurangnya pegawai dan perputaran/mutasi pegawai dengan berpedoman pada PERKA BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan PERMENPAN RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2	Pengiriman Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam jabatan baik diklat kepemimpinan maupun diklat teknis	Pengiriman ASN dalam rangka Diklat untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). dan diklat teknis untuk mengisi posisi fungsional
3	Evaluasi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara	Dengan adanya absen Siperlu sekarang tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN semakin baik dan meningkat dan pada saat apel dilakukan absensi apel manual yang di tanda tangani tiap pegawai
4	Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai	1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Efektifitas presensi yang diberlakukan BKD melalui monitoring tingkat kehadiran ASN dan Evaluasi Laporan baik Bulanan, Tribulan, Semester dan Tahunan, 2. Kode Etik Pegawai ASN Tahun 2017
5	SKP (Sasaran Kerja Pegawai)	Sudah dibuat setiap tahunnya sesuai dengan tugas jabatan dari masing-masing ASN yang dikerjakan berdasarkan PERKA BKN No 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan BKN dan juga untuk asaran CPNS juga sudah mulai dikerjakan
AREA PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	SPIP sudah dibuatkan SK Tim

